

BAB II

SELAYANG PANDANG TENTANG HMI

A. Sejarah awal berdirinya HMI ditengah kancah revolusi fisik

1. Situasi Negara Republik Indonesia

Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal, 17 Agustus 1945 oleh Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita-citanya membangun bangsa yang adil, makmur, maju dan modern sejajar dengan bangsa-bangsa modern lainnya di dunia ini. di peroleh dengan harga yang sangat mahal.

Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang mahal itu, tidaklah diperoleh dengan mudah, apalagi sebagai hadiah Jepang. tetapi ia merupakan usaha yang sangat meletihkan setelah melewati rentang waktu \pm 350 tahun terjajah. Setelah kemerdekaan itu diperoleh. Perjuangan untuk mempertahankan dan mengisinya justru jauh lebih berat. Sebab, setelah itu, Belanda datang lagi dan hendak melanjutkan dinasti penjajahannya; menguras habis kekayaan bangsa Indonesia , seraya membawa *Missi Zending*, di samping peradaban barat yang liberalis itu.

Sebenarnya, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilihat secara terpisah dengan situasi internasional, dimana pada saat itu gelombang perang kemerdekaan

dari segenap bangsa-bangsa dunia ketiga yang relatif terjajah, terutama dunia Islam untuk merebut dan menuntut kemerdekaannya masing-masing, yaitu upaya membebaskan diri untuk menentukan nasib dan kedaulatannya serta ikut menentukan peradaban dunia umumnya.

Kemerdekaan bagi bangsa ini dirasakan sebagai karunia Allah yang tak tertandingkan nilainya karena ia diperoleh melalui ikhtiar panjang rakyat yang mayoritas beragama Islam ini, Maka kalau ada kelompok yang paling mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah kelompok Islam. Bagi mereka, kemerdekaan adalah perjuangan mewujudkan salah satu essensi ajaran agamanya, maka dapat difahami bila ada pihak lain yang ingin merongrongnya dengan serta merta ummat Islam akan bersatu dan menggelorakan semangat jihadnya untuk membela tanah airnya yang telah merdeka itu.

A. Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwa, pada tahun-tahun pertama setelah proklamasi, ummat Islam Indonesia mencoba merumuskan corak masyarakat dan cita-cita politiknya yang hendak mereka ciptakan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah mereka bayar dengan harga yang sangat mahal itu, yaitu cita-cita politik yang selalu dihubungkan dengan pelaksanaan syari'ah dalam kehidupan individual maupun kolektif mereka. Suatu kehidupan yang ingin menampilkan masyarakat beriman yang bercorak universal. Setiap muslim yang sadar akan merasakan benar bahwa ia adalah anggota umat itu.

Identitas sebagai muslim banyak di tentukan oleh keterikatan spiritualnya dengan persaudaraan universal. itu secara teori, kata Syafi'i . Ummat ini percaya bahwa ajaran Islam itu meliputi seluruh dimensi kemanusiaan, dengan demikian, politik tidak dapat dipisahkan menjadi tata nilai yang berasal dari wahyu. (A. Syafi'i Ma'arif, 1988 : 12).

Jika konsep ini kita bawa turun ke masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, bahwa kita akan dihadapkan pada dua fenomena sosiologis yang tidak hanya berbeda tetapi bisa berhadapan secara tajam. Misalnya, golongan pertama tampil menjadi pendukung partai dan organisasi-organisasi yang berlabel Islam, menerima konsep tentang ummat dan agama Islam secara penuh, yaitu Islam sebagai jalan hidup total, maka bila ada sengketa antara agama dan negara maka jalan pikiran kita negaralah yang harus dikhususkan agar sesuai dengan ajaran Islam. Tapi sayang sekali semua ajaran islam dianggap prinsip sehingga mengabaikan tanggung jawab kehalifahan manusia di muka bumi. Sedangkan golongan kedua tampil tak kalah serunya bahwa, kegiatan politik merupakan tanggung jawab keduniawian belaka, soal agama adalah urusan pribadi yang tidak perlu dikaitkan dengan persoalan politik. Kemudian harus ditambahkan pula situasi negara Indonesia yang baru merdeka itu sangat lemah, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan, termasuk disini politik. Sebab, setelah meraih kemerdekaan ternyata secara politik

masyarakat harus berhadapan lagi dengan upaya merebut kembali ibu pertiwi ini dari penjajah. Pertempuran demi pertempuran dilakukan sebagai konsekuensinya adalah tidak saja mengakibatkan seluruh perhatian dan daya upaya diarahkan kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Akan tetapi bangsa dan rakyat Indonesia harus menghadapi realitas kemiskinan dan kebodohan yang ditinggalkan oleh penjajah, yang menjajah selama kurang lebih 350 tahun. (A. Syafi'i Ma'arif, 1988 : 13).

2. Kondisi ummat Islam Indonesia

Adalah pergerakan di dalam dunia Islam secara internasional akan mempengaruhi corak dan langgam pertumbuhan maupun kemerdekaan Islam di Indonesia. Ibnu Taimiyah (1263-1328) sebagai pembaharu di dunia Islam dikenal sebagai Muhyi Atsarif Salaf yakni pembangkit kembali ajaran-ajaran lama, ajaran dari pada shahabat dan Rasulullah, seraya mengingatkan bahwa pedoman satu-satunya adalah Al-quran dan As-sunah pendirian beliau ini didukung oleh **Ibnu Qoyyim Al-Zuuziah (1292-1350)** kemudian disebarakan secara lebih luas oleh **Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1787)**, kemudian dipergiat oleh **Sayyid Jamaluddin Al-Afgani (1838-1897)** serta muridnya **Syech Rasyid Ridho (1856-1939)** dalam aktifitas, Rasyid Ridho mengutamakan kemurnian agama dan menselaraskan kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, dan politik. Tidak ketinggalan pula di India ,muncul seorang ulama terkenal yaitu **Sayyid Ahmat Khan (1817-1897)** yang

dengan caranya sendiri menggerakkan berpikir kritis dan cara-cara hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Shalaf. (L. Stoddard, 1966 : 197-198).

Gelombang gerakan pembaruan tersebut memancar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia. Maka di negeri ini muncul tokoh-tokoh besar dan pemetaan organisasi yang modern. Dan apa yang tersebut kemudian itulah yang terjadi di kemudian hari sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ummat Islam dan ajarannya di Indonesia. Gerakan shalaf telah masuk ke Indonesia sekitar tahun 1802 dengan tokohnya Haji Miskin dan beberapa temannya yang baru pulang berhaji dan bermukim di Minangkabau. Kemudian di Jawa tumbuh perkumpulan Jami'at Khair yang berdiri pada tahun 1905 kemudian disusul dengan lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Organisasi yang tersebut kemudian bercita-cita menyeimbangkan kegiatan dunia dan akhirat dengan menonjolkan amal sosial dan pendidikan. Di Jawa Barat, tepatnya di Menes lahirnya organisasi Matla'ul Anwar pada tahun 1905 atas inisiatif KH M Yasin. Perkumpulan ini bekerjasama dengan Sarikat Islam (SI) pada masa kepemimpinan KH Abdurahman telah berani mengadakan penentangan terhadap pemerintah kolonial Belanda, terutama soal tanah, kebetulan di Jawa Timur lahir pula organisasi Nahdhatul Ulama (NU) pada tahun 1926 yang didirikan oleh KH Hasyim As'ari ((L. Stoddard, 1966 : 302).

Pada umumnya gerakan-gerakan yang tersebut di atas didalam mengarahkan kegiatannya secara tidak langsung kepada kegiatan politik, betapapun secara implisit mereka melakukannya. Ini berlaku bagi mereka yang tergolong modernis maupun reformis. Organisasi Islam yang mengarahkan aktifitasnya yang mengarahkan kepada gerakan politik secara eksplisit adalah seperti Serikat Islam (SI) di zaman HOS Tjokroaminoto. Seorang tokoh pergerakan yang terkenal dengan pandangan-pandangan politiknya yang terkenal tajam yang diarahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. ((L. Stoddard, 1966: 303).

Pergerakan kebangkitan Islam di Indonesia ini sangat mempengaruhi di awal kemerdekaan kelak. Sehingga di dalam sistem kenegaraan yang baru, ummat Islam ikut ambil bagian aktif di dalam konstalasi politik saat itu. Tepatnya pada tanggal 3 Nopember 1945 keluarlah keputusan pemerintah yang ditandatangani DR. Muhammad Hatta, yang membolehkan didirikannya partai-partai. Pengumuman ini karena dilatarbelakangi oleh persatuan dan kesatuan yang kukuh dari ummat Islam dan golongan lainnya sebagai panggung bangsa dan negara. Setelah lahirnya keputusan itu pada tanggal 3 Nopember 1945 di Yogyakarta diadakan Muktamar I ummat Islam se Indonesia dengan mengambil tempat di gedung Madrasah Mualimin Jalan Taman Sari 68 Yogyakarta, Muktamar yang dihadiri oleh hampir seluruh partai-partai dan sebagian organisasi Islam seluruh Indonesia.

Di dalam muktamar I tersebut dihasilkan berbagai keputusan penting diantaranya:

1. Mendirikan satu partai politik Islam yang bernama MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia).
2. Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam yang tidak boleh mendirikan partai politik Islam kecuali Masyumi.
3. Masyumi-lah yang akan memperjuangkan nasib ummat Islam Indonesia, dibidang politik. (Sitompul, 1976a : 14).

Beberapa bulan sebelum Masyumi terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1945 bertempat Balai Muslimin Jakarta kalangan angkatan muda Islam yang telah mendirikan GPII (**Gerakan Pemuda Islam Indonesia**) para pemuda yang membidani lahirnya GPII itu adalah: Anwar Tjokroaminoto, KH Wachid Hasyim, Moh. Natsir dan mendapat dukungan dari mahasiswa STI (**Sekolah Tinggi Islam**) yang sekarang menjadi UII sewaktu masih di Jakarta. Mereka antara lain; Anwar Harjono, Karim Halim, Ahmad Buchari, Janamar Azam, Sadli Muchsin, dan Afnan Syamni. Namun dalam perkembangannya karena situasi politik tidak berpihak dengannya terutama pada waktu zaman NASAKOM, tentulah GPII mendapat tantangan berat dan akhirnya **dibubarkan tahun 1963**. (Sitompul, 1986c : 15).

3. Kondisi perguruan tinggi

Akibat dari penjajahan Belanda sekian ratus tahun itu tidak saja menimbulkan kerugian material tapi juga spiritual. Kerugian spiritual itu tampak pada sikap mental masyarakat yang kehilangan rasa percaya diri sebagai bangsa. Di sini Belanda memang berhasil sekali, terutama di kalangan generasi muda Islam Indonesia menembus dinding-dinding perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Contoh pada tahun 1956 di Yogyakarta didirikan organisasi **Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY)** yang aktifitasnya amat berbau kebarat-baratan. Akibat yang ditimbulkan oleh PMY yang aktifitasnya kebarat-baratan itu adalah tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggotanya yang beragama Islam. Seperti ceramah-ceramah keagamaan kewajiban-kewajiban sebagai ummat beragama dikesampingkan. Lahir mendahului PMY adalah **SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia)** yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Klaten, Solo, Jakarta khususnya fakultas kedokteran yang tersebar di Klaten, Solo, disamping ada fakultas yang bertahan di Jakarta sebagai lembaga Republik. Tokoh-tokoh SMI antara lain: Utomo Ramelan, Suripno, Suyono Atmo dan Sugiono. Tokoh-tokoh tersebut dikemudian hari diketahui berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia PKI. ((Sitompul, 1986c : 14).

Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar sebenarnya sudah lama yaitu sejak awal kemerdekaan. Hal ini beralasan karena pada saat itu sudah banyak perguruan

tinggi di Yogyakarta setelah pemerintahan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Ibu Kota Yogyakarta sebagai mantan Ibu Kota RI dengan mendirikan UGM (Universitas Gajah Mada) sebagai universitas negeri pertama di Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 dan dua tahun kemudian pada tanggal 26 September 1951 didirikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di Yogyakarta. (Sitompul, 1976a : 15).

Sebagai gambaran detik-detik berdirinya HMI nampak di kota pelajar Yogyakarta ini sudah banyak perguruan tinggi atau fakultas-fakultas antara lain:

1. Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 kemudian pada tanggal 10 April 1946 pindah ke Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1948 berganti nama menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Sedangkan fakultas agamanya pada tanggal 26 September 1951 dijadikan PTAIN.
2. Universitas Gajah Mada waktu itu masih berstatus swasta milik Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada.
3. Akademi Ilmu Kepolisian.
4. Sekolah Tinggi Teknik.
5. Di luar Yogyakarta; seperti Klaten, Solo, terdapat fakultas kedokteran, ekonomi, dan farmasi yang akhirnya pada tahun 1984 fakultas-fakultas tersebut digabung di UGM Yogyakarta. (Sitompul, 1986c : 16).

Atas dasar pertimbangan strategis inilah Lafran Pane mudah prihatin manakala situasi perguruan tinggi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda tidak kondusif untuk tampil sebagai lokomotif perubahan, membentuk sarjana-sarjana muslim yang intelektual dan intelektual-intelektual muslim.

Sebenarnya bahwa kelompok mahasiswa muslim yang amat teguh dalam beragama tetapi sekaligus dengan amat mudah menolak segala yang berbau barat sehingga relatif mereka menjadi miskin segala unsur pemikiran yang lebih intelektual dan modern. Hal ini dipahami Lafran dkk pada gilirannya akan merugikan dan melemahkan ummat Islam sendiri. Dalam kondisi serupa ini HMI lahir pada tanggal 5 Pebruari 1947 di Yogyakarta. (Sitompul, 1984b : 88-93).

B. HMI dalam pergolakan dan peracaturan politik Nasional

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa HMI lahir di tengah revolusi fisik, yakni saat-saat ketika bangsa ini tengah berupaya mengukuhkan diri sebagai bangsa merdeka dengan pertarungan senjata akibat kolonialisme yang belum sepenuhnya mengakui kedaulatan dan kemerdekaan . Konsekwensi dari kondisi itu dengan di semangati oleh tujuan luhur organisasi, maka nyaris eksistensi HMI tidak pernah lepas dari konteks pergolakan bangsa . HMI hadir dalam ruang

nasional dengan setting sosial dan politik bangsa yang berubah-ubah dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan organisasi yang dicanangkannya. Organisasi ini lahir dilatar belakang oleh tiga setting sosio-religio-politik. Pertama, latar sejarah bangsa yang tengah mempertahankan kemerdekaan. Kedua, latar sejarah Perguruan Tinggi serta kondisi makro ummat Islam sebagai bagian mayoritas Bangsa Indonesia.

Ketiga background di atas meniscayakan posisi, peran maupun fungsi HMI tidak saja lahir sebagai organisasi kemahasiswaan yang mesti menyediakan diri sebagai wahana konseptual untuk memenuhi student need maupun student interest, namun juga organisasi perkaderan dengan menyediakan kader-kader terbaik untuk menjawab tantangan sejarah bangsa. Hal ini terlihat dari ungkapan yang amat populer dan didengung-dengungkan pada tahun 60-an maupun 70-an bahwa HMI adalah organisasi mahasiswa, organisasi kader dan organisasi perjuangan.

Ungkapan ini seperti diakui beberapa pengamat, tidak lepas dari unsur slogan, namun bagaimanapun juga amat membantu untuk memahami peran HMI dalam kehidupan ummat Islam dan Bangsa Indonesia. Sebab dalam ungkapan itu tersimpul wawasan tentang identitas organisasi, orientasi pemikiran dan perspektif keberadaan HMI di tengah-tengah kehidupan nasional. Trilogi jati diri HMI

sebagai organisasi mahasiswa, organisasi kader dan organisasi perjuangan itu dengan sendirinya membantu aspirasi HMI yang mempunyai dimensi kemahasiswaan, kekaderan dan perjuangan.

Menyimak sejarah kelahiran HMI dalam permulaan tahun 1947 ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah yang bersikeras ingin kembali menguasai republik Indonesia, mudah dipahami bila sejak semula HMI tidak hanya disemangati oleh cita-cita keagamaan akan tetapi juga cita-cita kemerdekaan bangsa. Hal ini tergambar dalam rumusan tujuan organisasi ketika didirikan. Yakni, mempertahankan negara RI dan menegakkan dan mengembangkan syi'ar agama Islam . Semangat inilah yang mengilhami kiprah HMI sepanjang sejarahnya hingga saat ini kendati intensitas dan manifestasinya berbeda-beda sesuai dengan tantangan jaman yang dihadapinya. Dalam semangat itu pula aspirasi ke-HMI-an dihayati oleh para anggotanya. Oleh karena itu arus utama yang tumbuh dan berkembang adalah arus integratif yang tidak mempertentangkan antara kedua cita-cita, yakni cita-cita ke-Indonesiaan dan cita-cita ke-Islaman.

Tumbuh berkembang dan malah kukuhnya arus integratif itu patut dicatat sebab dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia pernah tercatat terjadinya polemik tajam antara kalangan Islam dan kalangan nasionalis. HMI lahir dan berkembang tanpa diwarnai dan dipengaruhi oleh kontroversi Islam versus nasionalisme. Tentu saja menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana cita-cita

ke-Islaman dan ke-Indonesiaan itu tumbuh, berinteraksi dan saling mengisi dalam kehidupan HMI dan para tokohnya.

Dari sisi lain penting juga dicatat pula bahwa kelahiran HMI tidaklah diterima dengan tangan terbuka oleh organisasi Islam waktu itu. Hal ini memperlihatkan bahwa sejak semula HMI tidak mewujudkan dirinya sebagai "underbouw " dari suatu kelompok atau organisasi Islam yang ada. Dalam prespektif independensi itulah dapat dipahami mengapa dalam kalangan HMI bisa muncul penglihatan pendekatan dan pemikiran yang berbeda dengan berbagai kalangan ummat Islam tentang berbagai persoalan kemasyarakatan dan keagamaan . Ini tidak berarti bahwa HMI lepas sama sekali dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia . Ia bahkan ikut memberikan warna pada perkembangan itu tentu saja bukan oleh organisasinya tetapi melalui individu-individu alumninya bisa diduga kalau pandangan menuju pikiran-pikiran yang lalu dari beragam alumni itu beraneka ragam bahkan saling berbeda.

Warna atau kontribusi yang disumbangkan oleh HMI dalam konteks percaturan politik nasional tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal kondisi sosio-politik makro bangsa secara keseluruhan. Artinya peran itu dimainkan dengan memperhatikan kebutuhan, tantangan, dan semangat zaman yang melingkunginya. Hal ini karena HMI tidak lahir di dalam suatu ruang yang vakum. Sebaliknya seperti disinggung di atas kelahiran HMI dilatar belakangi oleh

berbagai nuansa zaman di awal kelahirannya yang kompleks. Oleh karena itu kontribusi organisasi kader-kader yang dilingkupi oleh *setting sosial-politik* berbeda-beda itu dapat dipilah-pilahkan ke dalam tahapan-tahapan atau fase-fase sejarahnya.

Disini merujuk pada pandangan sejarawan HMI yang cukup terkenal Agus Salim Sitompul (Sitompul, 1986c : 37).

Menurut Agussalim Sitompul ada delapan tahapan yang dapat dijadikan referensi untuk melihat bagaimana secara tepat memposisikan tubuh organisasi dalam konfigurasi sosio-politik bangsa dan umat Islam yang diwarnai oleh perkembangan dan dukungan kekuatan internal organisasi dan tantangan eksternalnya.

Delapan fase itu adalah : *Pertama*, Fase menulis jalan menuju konsolidasi sepiritual. Fase *pertama* ini merupakan fase awal pembentukan organisasi. Yang dapat dicatat dari fase ini adalah kenyataan pendepinisan terhadap formulasi Islam dalam konteks ke Indonesiaan. intinya dari sejarah jaman itu diperlukan sebuah gerakan pembaharuan dikalangan ummat Islam dan bangsa Indonesia. Fase awal ini di isi oleh upaya tak kenal lelah pemuda yang bernama Lafran Pane rame untuk menggalang solidaritas ke-Islaman di antara para mahasiswa Islam di tiga perguruan tinggi kala itu, yaitu Sekolah Tinggi Islam, Sekolah Tinggi Teknik (STT), dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada (sekarang UGM), untuk

bersama-sama menghadiri rapat membicarakan ikhwal pembentukan organisasi HMI. Akhirnya syah dicatat oleh sejarah, lahirlah organisasi ini disaat kuliah yang dikosongkan guna khusus memberi waktu pendirian organisasi ini yaitu tepat pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta. (Victor Tanja, 1991 : 52),

Lahirnya organisasi ini tentu membawa implikasi dan titik tolak tuntutan untuk mengupayakan perjuangan keras bagaimana agar eksistensi organisasi ditancapkan. Fase pengokohan. Fase ini ditandai tidak saja oleh tantangan sejarah hebat oleh kelompok - kelompok yang secara ideologis bersebrangan seperti halnya oleh Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), sebuah organisasi kemahasiswaan yang berhaluan komunis, namun juga disalah pahami oleh organisasi ke Islaman yang diwakili oleh Gerakan pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Hal ini diakibatkan terjadinya salah paham beberapa fungsionaris kedua organisasi Islam tersebut, sebab kehadiran HMI dianggap menyalahi kesepakatan yang dihasilkan oleh Mukhtamar I ummat Islam Indonesia yang melahirkan 3 keputusan dimana salah satunya adalah kesepakatan terhadap Masyumi sebagai satu-satunya partai politik ummat Islam. Dengan demikian kelahiran HMI yang secara struktural diluar masyumi hanya akan memecah belah dan melanggar hasil kesepakatan itu. GPII dan PII adalah organisasi di tingkat kepemudaan yang secara struktural berada dibawah naungan

Masyumi. Namun lagi seperti dicatat oleh Agus Salim Sitompul maupun Victor Tanja kesalahan pemahaman ini dapat di cairkan. (Sitompul, 1986c : 17) .

Kata kunci rahasia kalau boleh dikatakan demikian, kedua hambatan yang dialami oleh tokoh pendiri HMI dapat diselesaikan dengan baik bahkan HMI kemudian beroleh simpati baik dari sebagian anggota PMY maupun GPII dan PII tidak lepas pengalaman Lafran Pane yang luas. Disamping juga selama itu PMY amat mengabaikan dimensi rohaniyah dalam pergulatan organisasinya kedatangan HMI dengan sendirinya mengisi kekosongan spiritual dan kebutuhan keagamaan, hal yang tidak di peroleh di PMY. Tokoh-tokoh HMI yang memegang peranan penting dalam usaha awal mensosialisasikan gagasan berdirinya organisasi ini antara lain *.Letjend. Purnawirawan (Ahmad Tirta Sudiro), A. Dahlan Ranuwihardjo,SH* disamping Lafran Pane sendiri upaya gigih generasi awal ini tidak sia-sia hingga kemudian HMI semakin mendapat simpati dari banyak mahasiswa tidak saja dari lingkungan STI sendiri, namun juga dari balai Perguruam Tinggi Gajah Mada (Kini UGM). Demikian pula kesalahpahaman terhadap HMI dari GPII maupun PII dapat dipulihkan bahkan HMI di akui sebagai satu-satunya organisasi Islam yang bergerak di kalangan Mahasiswa.

Pada fase *ketiga* Sitompul membatasi dari tahun 1947- 1949 seperti diketahui tahun-tahun itu adalah masa revolusi fisik tahun bangsa sejarah memproklamirkan diri ini belum mendapat pengakuan yang dari bangsa kolonial.

Ketika mereka berusaha kembali menancapkan kekuasaannya di bumi tercinta. Di tengah pergolakan bersenjata itulah HMI mulai menunjukkan wujud manifestasi dan konsekuensi terhadap tujuannya. Yakni ikut mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, oleh karena itu dibentuklah Compi Mahasiswa (CM), semacam wadah perjuangan militer dari kalangan mahasiswa dengan tokoh utamanya Hartono (HMI) Corp ini dilatih langsung oleh markas besar tertinggi (MBT) TNI AD, kalaulah sekarang ditemui beberapa alumni HMI yang menyandang pangkat militer seperti halnya Letjen. Ahmad Tirto Sudiro, Mayjen Hartono, Dahlan Ranuwiharjo, mereka adalah beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam perjuangan militer pada ini dan kemudian meneruskan karir mereka di militer. (Sitompul, 1986c : 41).

Keterlibatan maupun keikutsertaan HMI dalam revolusi fisik, mempertahankan kemerdekaan merupakan pengalaman berharga, dukungan militer pada fase revolusi ini juga amat besar. Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam sambutannya pada *Dies Natalis HMI di Bangsal Agung Kepatihan Yogyakarta* tanggal 6 Februari 1948 menunjukkan harapannya yang besar pada HMI. Menurut beliau pada saatnya kelak HMI tidak saja bermakna Himpunan Mahasiswa Islam namun lebih besar akan menjadi Harapan Masyarakat Indonesia

Fase ke empat adalah fase antara tahun 1950 - 1963, yang menonjol dari fase ini adalah upaya pembinaan organisasi sebagai wahana perkaderan dan alat perjuangan bangsa selama awal-awal berdirinya organisasi ini konsolidasi internal

sempat terlantar akibat beberapa fungsionais yang terlibat dalam revolusi fisik menanggalkan senjata periode ini juga ditandai dengan kepindahan sekretariat Organisasi dari DIY Yogyakarta ke Jakarta sejalan dengan kepindahan Ibu Kota Negara pada tahun 1951. Selama 13 tahun HMI mengadakan konsolidasi organisasi sehingga dimungkinkan untuk tampil sebagai organisasi kader. Konsolidasi itu berupa pembinaan berat dengan membentuk basis organisasi sejak dari Komisariat, Cabang, Badan Koordinasi (Badko) dan lembaga-lembaga otonom. Juga diciptakan atribut-atribut organisasi oleh Prof. Drs. Ahmad Sadali dan Hymne organisasi diciptakan oleh RM. Akbar. Yang lebih substansial adalah disusunnya Tafsir tujuan Asas HMI, keperibadian HMI yang terdiri 6 butir. HMI sebagai organisasi kader dirumuskan dan ditetapkanlah metode Training HMI pada tahun 1962, disempurnakan lagi pada tahun 1963, untuk keperluan sosialisasi pemikiran-pemikiran ke-HMI-an dibentuklah sebuah penerbitan Majalah Media untuk keperluan komunikasi baik di lingkungan internal HMI, pemerintah dan juga dengan dunia luar. (Sitompul, 1986c : 48).

Fase-fase berikutnya yang berkisar tahun 1964 -1965 adalah fase tantangan menghadapi kekuatan komunisme (PKI). Dalam dokumen 4 tahunan PKI 1965 hingga 1966 yang dikemukakan, HMI termasuk salah satu kekuatan yang harus dibubarkan sebelum terjadinya peristiwa gestapu/PKI. Sebab menurut dokumen tersebut HMI adalah kekuatan agama yang paling keras menentang PKI

dilingkungan mahasiswa tugas ini di embankan kepada CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang secara ideologi maupun organisatoris bernaung dibawah PKI. Dengan senjata *Manipol-Usdek dan Nasakom*, PKI berusaha membubarkan HMI. Kondisi politik menjelang munculnya Tragedi Nasional 1965 memang amat menguntungkan PKI. Lobi yang kuat terhadap Soekarno dengan organisasi-organisasi sosial politik yang tidak sepaham dengan garis partai PKI satu-persatu berhasil dibubarkan. Isu-isu politik yang dilansir oleh PKI untuk memojokkan HMI antara lain HMI di tuduh anti pancasila, anti Bung Karno, antek DI/TII, HMI anak kandung Masyumi, HMI terlibat PRRI Permesta, HMI terlibat terhadap usaha pembunuhan Bung Karno, *HMI anti Manipol-Usdek, HMI anti Nekolin, HMI anti BPS dan Manikebu serta lain-lainnya.* (Sitompul, 1986c : 50)

Peristiwa Utrech yang terkenal itu terjadi pada fase ini *Prof Drs. Utrech, SH seorang sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Cabang Jember* dengan legalitas kekuasaannya mencoba melarang keberadaan HMI dilingkungan Unej , dengan dalih bahwa HMI termasuk organisasi terlarang (OT) .

Fase ini disebut tantangan sebab konstalasi politik Nasional menghadapkan HMI pada pilihan *to be or not to be* , yakni dibubarkan atau tetap hidup sebab kekuatan komunis seperti dituturkan oleh A. Dahlan Ranuwihardjo,SH sudah menegaskan kondisi HM I sebagai garis partai yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan melalui penyusunan kekuatan politik dan menggunakan kekuatan untuk

mempengaruhi kebijakan Bung Karno agar membubarkan HMI. (Sitompul, 1986c : 51).

Sejarah menggariskan kegagalan upaya PKI dan segenap kekuatan onderbouw-nya untuk meruntuhkan negara maupun membubarkan HMI. Justru organisasi ini, yaitu Partai Komunis Indonesia akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang (OT) di seluruh bumi Nusantara ini. Dengan demikian tantangan itu berhasil dilalui bahkan HMI dengan potensi kemahasiswaan memelopori penggalangan kekuatan penggerak angkatan 66. Ini adalah fase keenam sebagai fase pelopor dan pejuang Orba tahun 1966-1968.

Upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI G.30.S/PKI telah menimbulkan respon politik beragam dari ormas-ormas yang ada. Pada umumnya mereka mengutuk rencana jahat PKI dengan menculik beberapa Jenderal dan pejabat militer penting lainnya. Tanggal 01 Oktober 1965 HMI mengeluarkan sikap organisasi terhadap pemberontakan tersebut. Ada 4 poin sikap yang waktu itu diwakili oleh Ekky Syahrudin Darmin. P. Siregar. (Sitompul, 1995d : 198).

Pertama, arsitek dan dalang gerakan 30 September adalah PKI. **Kedua**, karena gerakan G.30.S/PKI adalah persoalan politik , penyelesaiannya pun harus secara politik, karena itu perlu dikerahkan kekuatan untuk menumpaskannya dan supaya dipimpin oleh NU. **Ketiga**, HMI meminta supaya pemerintah segera menindak dan membubarkan PKI. **Keempat**, HMI akan memberikan bantuannya

untuk membantu pemerintah dan ABRI menumpas G 30 S /PKI beserta antek-anteknya. Selain itu secara formal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dengan surat pernyataan Nomor ., p.2125/B/Sek./1965 tanggal 4 Oktober 1965 yang ditanda tangani *oleh dr. Sulastomo dan Mar'ie Muhammad* masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HMI menyampaikan sikap mengutuk PKI. (Sulastomo , 1990 : 53).

Peristiwa lain yang cukup menonjol pada fase ini adalah terbentuknya KAMI yang di pelopori oleh Mar'ie Muhammad (Wakil ketua PB HMI) untuk mendirikan KAMI pada 25 Oktober 1965 yang di sahkan oleh menteri PTIP Prof. Dr. Syarif Tayib. Tugas dari KAMI adalah

1. Mengamankan pancasila.
2. Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan gestapu sampai ke akar-akarnya.

Kemudian massa aksi KAMI pertama berupa pawai akbar dilaksanakan pada tanggal, 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI salemba Jakarta. Rapat umum yang dilanjutkan dengan demonstrasi ke departemen PTIP, Front Nasional yang mendukung interuksi PTIP membekuan CGMI, Perhimi, HSI, Perguruan Tinggi di bawah naungan PKI menuntut supaya dibubarkan. Menghadapi demonstrasi besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat ini, PKI relatif tidak goyah posisi politiknya. Di bawah bayang-bayang kebesaran nama Soekarno, PKI

masih dapat melindungi diri. Setelah hampir tidak memperoleh tanggapan berarti dari aksi-aksi massa ini, mulailah sasaran aksi beralih ke diri Presiden sendiri karena Soekarno bersikap tidak respek terhadap tuntutan massa yang tiada henti selama 11 hari non stop hingga puncaknya tanggal 11 Maret 1966 dengan dikeluarkannya *Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR)*.

Bangunnya Orde baru dengan tonggak sejarah peristiwa 11 Maret 1966 meniscayakan peran dan kontribusi HMI bagi dinamika perjalanan sejarah bangsa. Kontribusi itu tidak lagi berupa perjuangan fisik maupun ideologi melawan komunisme namun lebih berupa pemikiran.

Ada beberapa rumusan yang dapat dikonsepsikan tentang kontribusi itu :

- a. Partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan.
- b. Partisipasi pada pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran.
- c. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan langsung dari pembangunan.

Kaitannya dengan partisipasi di bidang pemikiran, satu ciri khas yang dikembangkan oleh HMI adalah watak kemerdekaan dan independensi dalam berpikir. Bertolak dari liberalisme yang tidak mengabaikan dimensi transedensi inilah gerakan pembaharuan secara dinamis dapat dikembangkan. Pergolakan dibidang

pemikiran ini tidak lepas dari upaya menjawab dinamika ekstern yang kiat cepat dan mesti diimbangi oleh dinamika internal organisasi. (Sitompul, 1986c : 55-57).

C. Peran HMI dalam proses perkembangan politik di Indonesia

HMI sebagai kader Umat dan kader bangsa.

Dengan tidak mempertentangkan antara komitmen terhadap nilai-nilai ke-Islaman sebagai landasan gerak organisasi dengan komitmen kebangsaan sebagai ranah aktualisasi nilai-nilai ke-Islaman di atas kedalam lingkup bangsa meniscayakan integralitas komitmen secara utuh. Nilai-nilai ke-Islaman pada sandaran norma-norma akidah sebagaimana tertuang dalam Al-Qurán dan As-sunnah SAW, senantiasa menafasi langkah pemikiran organisasi. Sementara aspek lingkup konkretisasi riil perwujudan komitmen itu adalah kualitas pluralitas kebangsaan, di mana mayoritas umat Islam. Oleh karena itu sebagaimana yang di katakan Sulastomo . (Sulastomo, 1990 : 57).

HMI adalah organisasi yang *independen* menempatkan dirinya sebagai kader umat Islam. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa HMI merupakan bagian dari umat Islam Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa HMI sejak kelahirannya telah mendeklarasikan wawasan kebangsaan di samping wawasan ke-Islaman, kepemudaan dan kemahasiswaan.

Dari deskripsi tersebut bagaimana seharusnya HMI bersikap, berbuat dan bertindak dalam semua kehidupannya sebagai kader umat dan bangsa, Sulastomo menunjukkan suatu uraian yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sejak didirikannya pada *tanggal 5 Februari 1947 HMI* sudah menempatkan diri sebagai kader umat Islam dan bangsa Indonesia.
- b. Menempatkan HMI sebagai kader umat Islam dan bangsa Indonesia membawa konsekuensi beban berat dan sulit dipikul oleh HMI baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Sebagai calon cendekiawan dan pemimpin di masa mendatang, HMI harus berperan dan mempersiapkan diri menghadapi tugas sebagai kader umat dan bangsa.
- d. Umat Islam (termasuk HMI) di dalamnya sebagai kelompok mayoritas dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memahami kepentingan kelompok lain, agar kesatuan bangsa dapat dipelihara dengan harmonis.
- e. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip HMI harus ikut berpartisipasi dalam pergolakan bersenjata, revolusi atau perjuangan bangsa. HMI tidak boleh eksklusif tetapi harus inklusif, sebagai pejuang harus berada ditengah-tengah arena, bahkan sebaliknya di lain gelanggang. Dengan cara itulah HMI ikut bertanggung jawab terhadap jalannya bangsa dan negara, tidak ikut arus dominan yang berlangsung terutama

- yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai religiusitas yang menjadi landasan organisasi.
- f. Menatap berbagai persoalan umat seperti usaha rehabilitasi Masyumi dan ide mendirikan partai Islam baru, HMI lebih mengutamakan azas manfaat berdasarkan pertimbangan politik. Maka HMI lebih cenderung mendirikan partai Muslimin Indonesia.
 - g. Resiko yang diambil seandainya HMI dibubarkan, anak-anak HMI akan menyebar ke Muhammadiyah, NU, PSI, dan Perti, tetapi untuk membubarkan diri HMI tidak mau.
 - h. Sebagai kader umat dan bangsa harus bisa menahan diri dan juga perlu memiliki sikap mandiri atas landasan cita-cita HMI.
 - i. Kepentingan Nasional dan umat harus dipadukan apabila hal ini tidak dicapai tidak akan menumbuhkan iklim yang sehat dan dinamis yang merupakan syarat bagi pembangunan nasional.
 - j. Tekad untuk dapat menjadi kader bangsa hanyalah dapat ditunjukkan apabila kita mampu mengorbankan kepentingan kita untuk kepentingan Nasional /bangsa yang lebih besar.

Pokok-pokok pikiran dalam konteks peran HMI di atas menstarakan dinamika perkembangan HMI dengan perkembangan bangsa. Kesadaran politik egaliter atas dasar wawasan pembaharuan dan watak yang bebas, independen semuanya dapat jalin-menjalin di dalam sejarah HMI sehingga hampir-hampir tidak mungkin kita memperbincangkan salah satu unsurnya tanpa menyangkut pada anasir yang lain. Oleh karena itu sejak saat dini, HMI ikut serta dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Tak lama setelah HMI berdiri berlangsunglah perundingan Linggarjati

yang terkenal itu, antara pemerintah Belanda dengan wakil-wakil pemerintah Indonesia. Adapun hasil-hasil perjanjian Linggarjati tersebut adalah :

1. Pemerintah Indonesia dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia defakto atas pulau-pulau Madura, Jawa dan Sumatra.
2. Pemerintah Indonesia dan Belanda setuju terhadap pembentukan sebuah Republik Federal yang akan berlaku pada 1 Januari 1949. (Victor Tanja, 1991 : 82).

Menanggapi hasil perjanjian tersebut terdapat perbedaan pokok antara pandangan politik HMI dan Masyumi. Dalam sebuah wawancara Lafran Pane (pendiri HMI) dengan Victor Tanja , ditegaskan pula bahwa HMI membenarkan hasil perundingan sebagai sesuatu yang mungkin menyebabkan penyerahan kedaulatan terjadi melalui jalan damai, sedangkan Masyumi tidak membenarkan persetujuannya. Dalam hal ini menurut Lafran Pane lebih jauh, HMI menjalankan penilaiannya yang bebas penuh pertimbangan, menyadari pertentangan dengan Masyumi yang saat itu masih merupakan wadah aspirasi politik kaum muslimin. Keran perlawanan kuat yang dilancarkan oleh bagian terbesar golongan politik terhadap keputusan yang ditetapkan di dalam perundingan tersebut, pemerintah Belanda melancarkan serangan militer mendadak yang bagi Belanda terkenal dengan istilah aksi Polisionel I ditujukan kepada Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Menurut para pimpinan HMI dengan melancarkan aksi Militer I itu Pemerintah Belanda tidak berniat menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan alasan inilah maka HMI

bersama-sama dengan Masyumi dan bagian terbesar golongan politik yang lain menolak keputusan-keputusan perundingan Renville. Di luar dugaan umum kaum Komunis dan golongan sayap kiri lainnya terdorong oleh hasratnya yang kuat untuk merebut kekuasaan pemerintah, mendukung hasil-hasil perundingan. Berkat dukungan sayap kiri itulah yang memungkinkan Amir Syarifuddin berusaha menarik beberapa anggota Masyumi dan golongan non komunis lainnya untuk ikut serta kedalam pemerintahan. Menanggapi ajakan ini dua orang anggota Masyumi Wondoamiseno dan Aruji Kartawinata, tanpa mendapatkan persetujuan ikut bergabung di dalam kabinet. Melawan tindakan yang diambil oleh Masyumi terhadapnya, ditinggalkannya partai itu dan ikut membangun PSII (Vicotr Tanja, 1991: 82).

Bagaimanapun daya upaya Amir Syarifuddin melakukan perlawanan keras terus berlangsung dari golongan Islam, Nasionalis dan golongan-golongan non komunis yang lain. Bersama golongan-golongan ini HMI ambil bagian dalam menggalang kekuatan untuk menjatuhkan kabinet Amir Syarifuddin. Sebagai penggantinya Masyumi dan PNI, partai yang didirikan oleh Bung Karno 1928 menyusun Pemerintah koalisi yang bebas dari segala pengaruh komunis tahun 1948.

Perbedaan sikap dalam merespon perjanjian Renville dan Linggarjati, antara pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintahan Nasional pasca aksi kolonial di atas adalah bagian dari kenyataan bahwa HMI tidak identik atau dalam banyak hal

berbeda dalam hal bersikap dengan Masyumi. Perbedaan lain misalnya terdapat pada saat Pemilihan Umum pertama pada tahun 1955. Dalam pemilu pertama itu berbagai partai politik Islam telah gagal mempersatukan diri untuk memenangkan bagian terbesar kursi di Parlemen. Dan dengan demikian kehilangan kesempatan membangun negara Islam. Selama Pemilu tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan keagairahan untuk mendukung secara langsung Papol Islam tertentu dalam garis organisasi yang kaku. Melainkan HMI menyerahkan pada sikap dan nurani memilih masing-masing anggota. Sikap netral organisasi ini sesuai dengan kenyataan bahwa alumni HMI menduduki pimpinan-pimpinan dalam semua Papol Islam yang ada ketika itu. Walau diharapkan bahwa HMI akan mendukung *Masyumi* karena kesamaan wawasan keagamaan mereka yang baru itu namun ternyata tidak demikian. Dalam tahun 1958 terdorong terutama oleh rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara pemerintah pusat dalam menangani pemerataan kesejahteraan ekonomi pemerintah daerah Sumatra dan beberapa daerah di Sulawesi bersama sekutu mereka di dalam angkatan bersenjata melancarkan suatu pemberontakan. Mereka mengumumkan berdirinya pemerintah baru yang disebut dengan pemerintahan revolusioner republik Indonesia. (Vicotr Tanja, 1991 : 83-85).

Dalam pemberontakan tersebut beberapa pimpinan Masyumi dan partai sosialis Indonesia (PSI) terlibat. Berhadapan dengan situasi tersebut, HMI

mengeluarkan sebuah pernyataan tentang ketidaksetujuan terhadap pembentukan pemerintahan baru. Ia pun menegaskan bahwa Masyumi sebagai partai tidak harus dipersalahkan karena dukungan terhadap pemberontakan tersebut. Pembatasan-pembatasan terhadap semua kegiatan politik oleh pemerintah Nasional yang meluas itu tidak banyak yang dapat dilakukan oleh HMI demi kepentingan kemerdekaan politik.

Puncaknya adalah ketika Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Soekarno pada tahun 1960-an, pelarangan Masyumi itu sendiri sebenarnya amat kontroversial. Soekarno dengan kekuasaan besarnya mengatakan bahwa Masyumi dibekukan atas dasar pengaruh politik PKI yang banyak mewarnai keputusan-keputusan pada pandangan politiknya. HMI menghadapi dilematis, disatu sisi harus mewujudkan loyalitasnya pada Bung Karno sebagai pemegang sah pemerintahan, sementara Masyumi adalah aset umat yang pembubarannya lebih banyak disebabkan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan baik secara konstitusional maupun secara moralitas politik.

Memposisikan diri dalam situasi politik demikian maka dalam Kongres ke-6 HMI mengeluarkan sikap politik sebagai upaya agar tidak menimbulkan pertentangan sebagai dasar program organisasi dengan 4 (empat) pokok-pokok pikirannya, yaitu :

1. Tetap setia kepada Islam dan tanah air Indonesia.

2. Meneruskan kepemimpinannya ditengah ummat umumnya dan meneruskan pertanggungjawaban untuk mempersatukan anasir yang beraneka ragam di dalam ummat.
3. Melanjutkan kepemimpinan di tengah-tengah gerakan mahasiswa Indonesia.
4. Melanjutkan asas-asas masyarakat ke-Islaman di tengah masyarakat Indonesia umumnya

Keputusan tersebut amat hati-hati juga keputusan yang menunjukkan bahwa keberhasilan Presiden Soekarno membubarkan Masyumi memberikan indikasi terang kiranya kesia-siaan berada pada kondisi *antagonistik* politik. Dalam posisi itu tampak kerumitan respon politik eksternal tidak hanya dialami oleh HMI namun juga Ormas atau Orpol ke-Islaman yang lain. Di satu sisi kebijakan Bung Karno semakin condong memberi angin segar bagi perkembangan komunisme, sementara di sisi lain di antara kekuatan-kekuatan itu diperlukan oleh Soekarno untuk menciptakan perimbangan politik (*politik balance*). Hal ini tampak pada perlunya ketiga kekuatan politik bersatu dalam bangunan struktur pemerintahan dengan bergabungnya kekuatan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom). (Vicotr Tanja, 1991 : 87).

Menyadari keunggulan angin politik akibat diberlakukannya konsep Nasakom, PKI secara leluasa berani dan lebih terbuka baik dalam menyerang lawan-lawan politiknya maupun mempengaruhi dan mengintervensi sikap dan pandangan politik organisasi yang dianggap menjadi halangan bagi perwujudan

cita-cita komunisme. Setelah berhasil membungkam Masyumi, PKI dengan kekuatan-kekuatan kiri lainnya mencanangkan target politik membungkam HMI. Isu-isu politik yang dilontarkan untuk menarik simpati dari Bung Karno bahwa HMI anti revolusi, anti Soekarno, anti Nasakom dan HMI adalah agen CIA sehingga lebih berpihak pada Malaysia dalam konfrontasi dengan Indonesia. (Vicotr Tanja, 1991: 97).

Berbeda ketika Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 1960-an, di mana organisasi Islam tidak berani secara terbuka bersama-sama melakukan solidaritas dukungan dan kecaman terhadap pemerintah maupun kekuatan komunis yang banyak mempengaruhi pandangan politik Soekarno, maka tuntutan pembubaran HMI telah mengundang protes massa dan demonstrasi besar-besaran masyarakat muslim sebagai bentuk dukungan simpati serta kutukan penolakan tuntutan itu. Ormas-ormas semacam NU, Muhammadiyah, PSII, Perti yang pada kasus pertama lebih banyak diam pada saat HMI menghadapi tuntutan pembubaran, secara bersama-sama menyatakan diri siap berkorban jiwa, raga demi kelangsungan hidup HMI. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangan politik demikian tidak saja dukungan dan simpati lahir dari ormas-ormas keIslaman namun juga dukungan datang dari ABRI. Dalam konstalasi politik orba, dukungan ABRI terhadap kekuatan organisasi mahasiswa termasuk HMI tidak dapat diingkari. Soelastomo mencatat bahwa jangkauan dari benturan-benturan kekuatan yang di

timbulkan PKI menuju kekuasaan dengan kudeta itu begitu luas. Kekuatan-kekuatan pendobrak berusaha melawan komunis merupakan embrio Orde baru, sehingga gerakan Orde baru merupakan gerakan masyarakat luas. (Vicotr Tanja, 1991 : 96).

Sesudah koup PB HMI menyampaikan beberapa pernyataan tentang peristiwa tersebut kepada pimpinan militer nasional dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Partai Komunis Indonesia adalah dalang utama kup yang gagal itu.
2. Seluruh barisan Islam harus bersatu di bawah pimpinan NU untuk mengutuk kaum komunis beserta simpatisan-simpatisannya.
3. Mutlak perlu PKI dibubarkan.
4. HMI siap dengan segala daya upaya membantu pelaksanaan pembubaran PKI itu (Sulastomo, 1990 : 53).

Perkembangan politik di Indonesia drastis berubah dengan titik amat ekstrim dari Orde lama yang poros utama kekuatan adalah Bung Karno, AD, PKI menjadi kekuatan penentu yang tidak lagi mentolerir PKI. Pemerintahan itu adalah Orba yang merupakan antitesis dari pemerintahan sebelumnya dengan melakukan koreksi secara total terhadap kelemahan-kelemahan yang dilakukan pemerintah Orla sehingga pada puncaknya yang dianggap telah menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks ini peran politik HMI dalam proses perkembangan politik di Indonesia mesti dipahami sesuai dengan setting sosial politik makro bangsa. Bukan diletakkan secara terpisah dan menyendiri dari rangkaian kekuatan politik yang lain. Peran politik HMI karenanya bersifat inklusif, meliputi dan eksis di tengah-tengah gelanggang masyarakat. Bukan mengisolasi diri apalagi eksklusif dan menjaga jarak. Pada masa pengganyangan PKI, HMI menyadari sepenuhnya bahwa peran politik itu dimanifestasikan dengan penggalangan dan aksi massa guna membangun opini publik dan menciptakan solidaritas antar kekuatan-kekuatan politik non komunis untuk secara bersama-sama membubarkan dan menuntut dinyatakannya PKI sebagai organisasi terlarang. Melalui demonstrasi KAMI maka tuntutan itu terjawab dengan dibubarkannya PKI secara nasional pada tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran PKI dalam visi HMI bukan saja secara ideologis PKI tidak mendapatkan legitimasi teologis, melainkan juga PKI telah melahirkan pertentangan-pertentangan dengan meletakkan konsep kebangsaan dan keagamaan sebagai 2 (dua) unsur diametral. Jadi sikap politik ini mencerminkan prinsip-prinsip organisasi yang sejak awal kelahirannya telah mengukuhkan diri terhadap 2 (dua) komitmen dengan selaras, serasi dan sejalan antara di satu sisi prinsip keIslaman dan kebangsaan sebagai 2 (dua) essensi yang saling mengisi dan mensubstansiasi. (Victor Tanja, 1991 : 101).